



**Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia**

Siaran Pers Nomor: 180/HUMAS PMK/VIII/2022

Pemerintah Pakai "Data Spesial" untuk Pertajam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

KEMENKO PMK -- Pemerintah terus berupaya untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memperbaiki tingkat akurasi data.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan bahwa saat ini pemerintah telah merancang data spesial untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Kata Muhadjir, data spesial ini untuk meningkatkan ketepatan sasaran jangkauan intervensi pemerintah dalam menangani kemiskinan di Indonesia. Data spesial yang dimaksudnya adalah Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

"Kita menggunakan data spesifik, data spesial. Namanya data P3KE. Ini adalah data final dari triangulasi pemutakhiran melalui pen Shahihan dari data yang telah ada," ujar Muhadjir usai Rapat membahas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem bersama Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, di Istana Wapres Jakarta, pada Rabu (3/8).

Menko PMK menjelaskan, data P3KE bersumber dari pendataan BKKBN yang telah diperingkat kesejahteraannya dan terbuka untuk diharmonisasikan dengan data program dari Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah. Data P3KE ditujukan untuk melengkapi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan meningkatkan akurasi pen yasaran program kemiskinan, khususnya untuk menjangkau keluarga miskin ekstrem yang belum mendapat program atau yang disebut dengan exclusion error.

"Ini kita kompilasikan, cross di situ untuk memastikan siapa yang benar-benar menjadi kelompok sasaran 'by name by address'," ujar Muhadjir.

Lebih lanjut Menko PMK mengatakan, dengan adanya data P3KE, diharapkan penyaluran intervensi bantuan dari pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang belum mendapatkan bantuan, yang tidak terdapat di data kependudukan dan lebih tepat sasaran.

"Dengan adanya Data P3KE ini kesempatan untuk mengeksekusi mereka yang miskin ekstrem yang tidak memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan), dan yang selama ini tidak dapat bansos kita pastikan dapat bansos," ucapnya.

Sebelumnya dalam rapat, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjelaskan, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem berkurang sebesar 1 (satu) persen tiap tahun hingga 2024. "Saya minta kita fokus menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem minimal 1 poin persentase setiap tahun, mulai tahun 2022 ini," ujar Wapres.

Lebih lanjut, Ma'ruf yang bertindak sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menerangkan, pemerintah sudah memiliki tiga instrumen kebijakan untuk menangani kemiskinan ekstrem.

Pertama, penetapan wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem untuk periode 2022, 2023 dan 2024 yaitu di 212 kabupaten/kota prioritas pada 2022 dan dilanjutkan untuk seluruh kabupaten/kota untuk 2023 dan 2024.

Kedua, Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Ketiga adalah pelaksanaan pedoman umum percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang akan segera ditetapkan.

Merujuk pada data BPS, tingkat kemiskinan ekstrem pada 2021 adalah 4 persen. Presiden RI Joko Widodo menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem bisa mencapai 0 persen pada 2024. Dengan berbagai instrumen kebijakan yang telah ditetapkan, maka pemerintah berharap, target penurunan kemiskinan ekstrem bisa tercapai. (*)

**Bagian Humas dan Perpustakaan,
Biro Hukum, Informasi dan Persidangan,
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
roinfohumas@kemenkopmk.go.id
www.kemenkopmk.go.id
Twitter@kemenkopmk
IG: kemenko_pmk**